

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada 7 Juli 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat untuk memasang *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di wilayah Korea Selatan (US DOD 2016). Sistem THAAD dimaksudkan untuk menangkal nuklir Korea Utara. Namun kesepakatan ini mendapat penolakan dari Cina yang menilai sistem tersebut dapat mengganggu kedaulatan. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dalam wawancaranya di Colombo pada 9 Juli 2016 mengatakan bahwa pemasangan sistem THAAD jauh melampaui kebutuhan pertahanan Semenanjung Korea. Lebih lanjut, pihaknya meminta AS tidak menggunakan ancaman keamanan sebagai alasan mengganggu kepentingan negara lain dan berharap Korea Selatan dapat mempertimbangkan keputusannya (FMPRC 2016a).

Menteri Wang kembali menyatakan keberatan terkait THAAD ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung Se di Vientiane pada 24 Juli 2016. Menteri Wang mengkritik keputusan Korea Selatan untuk memasang THAAD dan mengatakan instrumen tersebut akan merusak kepercayaan yang telah dibangun kedua negara selama ini. Lebih lanjut, hal ini akan mengganggu stabilitas keamanan regional dan hubungan kedua negara. Menurutnya, THAAD bukan isu teknis sederhana melainkan isu strategis. Di sisi lain, Menteri Yun berdalih pemasangan THAAD dimaksudkan untuk menjaga keamanan Korea Selatan dan tidak merusak kepentingan keamanan Cina. Pihaknya juga ingin terus menjaga hubungan baik dengan Cina. Segala tantangan seharusnya mampu diselesaikan melalui kerja sama sebagaimana kemitraan strategis yang dilakukan kedua negara (China Embassy in UK 2016). Sejak saat itu, hubungan Korea Selatan dan Cina memanas dan muncul berbagai berita

mengenai boikot. Boikot menyerang klaster industri budaya Korea Selatan<sup>1</sup> di Cina. Boikot yang terjadi antara lain berupa larangan penampilan figur publik maupun tayangan asal Korea Selatan di televisi Cina, pemerintah Cina tidak memberi izin acara yang melibatkan komponen Korea Selatan, pemecatan pekerja industri budaya dari proyeknya di Cina, boikot terhadap Lotte dan boikot pariwisata Korea Selatan.

Boikot di televisi terjadi mulai Agustus 2016 saat jaringan televisi Jiangsu mengaburkan dan memotong penampilan bintang K-pop Psy dan iKON dalam acara “Heroes of the Remix”.<sup>2</sup> Nasionalitas peserta acara ragam Cina “If You are the One” yang berasal dari Korea Selatan juga disensor.<sup>3</sup> Pembatalan acara dialami oleh Kim Woo-bin dan Bae Suzy. Keduanya dijadwalkan melakukan promosi drama “Uncontrollably Fond” di Beijing namun ditunda tanpa penjelasan lebih lanjut (Chitrakorn 2016). Grup penyanyi EXO juga mengalami pembatalan acara karena penyelenggaraannya tidak mendapat persetujuan pemerintah Cina. Dua konser EXO di Shanghai yang seharusnya digelar pada Agustus 2016 dibatalkan (Qin & Choe 2016). Kemudian konser “EXO Planet #3” di Nanjing, Cina, yang seharusnya digelar pada 17 Desember 2016 ditunda (Son 2016b).

Pemecatan dialami oleh bintang *Hallyu* Jun Ji Hyun dan Song Joong Ki yang merupakan *brand ambassador* merk ponsel di Cina. Secara tiba-tiba, keduanya mendapat pemutusan kontrak dan perannya digantikan oleh aktor dan aktris asal Cina (Korea Times 2016). Tidak hanya menyerang komponen budaya populer, musisi klasik ikut terkena boikot. Veteran soprano Jo Su Mi dipecat dari konser *tribute* untuk Maria Callas di beberapa kota di Cina hanya sebulan sebelum konser dilaksanakan. Hal ini dikonfirmasi oleh Xi’an Concert Hall yang menghapuskan jadwal konser Jo Su Mi di informasi daringnya. Pembatalan konser juga dialami oleh pianis Korea Paik Kun Woo. Paik seharusnya tampil

---

<sup>1</sup> Klaster industri budaya yang dimaksud adalah industri yang melibatkan budaya + pariwisata dengan dukungan elemen politik dan privat. Definisi ini berdasarkan bagan dari Invest in Korea (2017).

<sup>2</sup> Lihat lampiran 1

<sup>3</sup> Lihat lampiran 2

bersama Guiyang Symphony Orchestra, tetapi kemudian digantikan oleh pianis Cina Sa Chen (Qin 2017).

Boikot turut dialami oleh Lotte. Selain termasuk dalam klaster industri budaya Korea Selatan, Lotte adalah perusahaan yang menyerahkan lahannya di Seongju untuk dijadikan tempat pemasangan THAAD. Pada November 2016, hari yang sama saat kesepakatan antara Lotte dan pemerintah dibuat, pihak berwenang Cina mendenda salah satu supermarket Lotte di Beijing sebesar 6.500 USD dengan alasan melakukan *false advertising*. Berbagai anak perusahaan Lotte di Beijing, Shanghai dan Chengdu juga secara tiba-tiba menjadi sasaran investigasi kebakaran, keselamatan dan pajak (Kaiman & Stiles 2017). Lebih lanjut, Wei Long Food sebagai partner bisnis Lotte mengumumkan berhenti menjual produknya di Lotte Mart (Lin 2017).<sup>4</sup> Platform *e-commerce* JD.ID dan Jumei.com juga berhenti menjual produk Lotte (Jourdan 2017).

Di bidang pariwisata, boikot Cina terjadi dalam beberapa tahap. Pada 3 Agustus 2016, agen visa Cina di Korea berhenti menyediakan layanan pembuatan visa bisnis (Lee & Lee 2016). Kemudian pada Oktober 2016, *China's National Tourism Administration* (CNTA) menginstruksikan agensi travel Cina untuk mengurangi jumlah wisatawan ke Korea Selatan hingga 20 persen (Ye & Seong 2016). Pada 2 Maret 2017, CNTA mengeluarkan "Seven Guidelines" antara lain: 1) menghentikan penjualan grup travel ke Korea Selatan mulai 15 Maret; 2) menghentikan perjalanan bisnis pribadi ke Korea Selatan; 3) menandai semua item terkait Korea sebagai *sold out*; 4) melarang segala bentuk produk perjalanan yang berkaitan dengan Lotte Corporation; 5) menghapus paket perjalanan murah di Korea; 6) melarang kapal pesiar untuk berlabuh di pelabuhan Korea; dan 7) menghukum para pelanggar (Kwon, Kim dan Kang 2017). Selanjutnya pada 3 Maret 2017, CNTA mengeluarkan *notice* di situs webnya mengenai himbauan dan peringatan apabila hendak berwisata ke Korea Selatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat lampiran 3

<sup>5</sup> Lihat lampiran 4

Pada 3 Maret 2017, Beijing Wanzhong Tourism Travel Service mengumumkan pembatalan paket tur ke Korea Selatan.<sup>6</sup> Guo Jinming, kepala penjualan online perusahaan tersebut, mengatakan bahwa keputusan untuk membatalkan tur ke Korea Selatan adalah tepat dan merupakan langkah patriotis dari perusahaan pariwisata karena kesepakatan pemasangan THAAD antara Korea Selatan dan AS (China Daily 2017). Kemudian pada 8 Maret 2017, Royal Caribbean mengumumkan penghentian rute ke Korea Selatan untuk kapal-kapalnya yang berangkat dari Cina dengan alasan mempertimbangkan tensi yang tengah memanas antara Korea Selatan dan Cina.<sup>7</sup>

Permasalahan THAAD menciptakan suasana hubungan yang tidak baik antara masyarakat Cina dan Korea Selatan. Berdasarkan *polling* Global Times (2016) di situs afiliasinya, 95 persen dari total 6.000 responden setuju memboikot seluruh produk Korea, termasuk produk budaya dan hiburan yang sangat populer di Cina. Pada 26 Februari 2017, terjadi demonstrasi di depan Lotte Mart Kota Jilin dengan slogan “get out of China” (Yan 2017). Di Korea, aksi Cina juga mendapat tanggapan buruk dari masyarakat. Menurut hasil penelitian Kim, Lee dan Kang (2017) mengenai perubahan opini publik Korea Selatan akibat THAAD, Cina menjadi negara yang paling tidak disukai melebihi Jepang yang sebelumnya selalu menempati peringkat pertama. Indeks *favorability* masyarakat Korea terhadap Cina menjadi 3,21, sementara terhadap Jepang sebesar 3,33.

Permasalahan THAAD menemukan titik terang setelah Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha menyatakan persetujuan terhadap poin *Three NOs* yang diinginkan Cina yaitu: 1) tidak ada pemasangan THAAD tambahan; 2) tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil AS; dan 3) tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan AS dan Jepang. Menteri Kang mengumumkan hal tersebut dalam audit parlemen oleh Majelis Nasional pada 30 Oktober 2017 (Jung 2017). Kemudian pada 31 Oktober 2017,

---

<sup>6</sup> Lihat lampiran 5

<sup>7</sup> Lihat lampiran 6

Kementerian Luar Negeri Cina mengumumkan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan (FMPRC 2017).<sup>8</sup>

Mudah dipahami bahwa Cina setuju melakukan normalisasi hubungan karena negara tersebut berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Cina berhasil mencegah Korea Selatan semakin dekat dengan rival-rivalnya di Asia Timur. Di sisi lain, Korea Selatan tidak terlihat memiliki keuntungan dari menyepakati *Three NOs*. Ini justru menempatkan Korea Selatan pada posisi yang sulit di tengah persaingan antara AS dan Cina dan kepentingannya sendiri. Terlebih, poin mengenai boikot tidak dimuat dalam pernyataan normalisasi hubungan.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas memunculkan pertanyaan penelitian yaitu “Mengapa Korea Selatan menyepakati *Three NOs* dalam normalisasi hubungan dengan Cina?”

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Korea Selatan menyepakati *Three NOs* dalam normalisasi hubungan dengan Cina.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui permasalahan terkait isu THAAD antara Korea Selatan dan Cina.
- b. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam mengatasi permasalahan THAAD.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan yang diambil Korea Selatan dalam menyelesaikan permasalahan akibat THAAD.

---

<sup>8</sup> Lihat lampiran 7

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini tentu saja adalah untuk berguna bagi pembaca. Adapun manfaat tersebut terbagi menjadi dua:

### **1.4.1 Akademis**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan negara dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sekaligus memperkaya penelitian hubungan internasional tentang penyelesaian konflik, khususnya konflik bilateral.

### **1.4.2 Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun referensi bagi pemerintah negara yang mengalami permasalahan dengan Cina, khususnya Korea Selatan. Kemudian dapat pula menjadi rujukan untuk diadakan penelitian selanjutnya yang serupa maupun yang berkaitan dengan kasus ini.

## **1.5 KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini membahas tentang penyebab sebuah negara melakukan kerja sama. Dalam hubungan internasional, teori mengenai kerja sama banyak dibahas dalam perdebatan neorealisme dan neoliberalisme (Lihat Baldwin 1993, Powell 1994). Akan tetapi, kaum neorealis dan neoliberalis memiliki persamaan keyakinan dalam derajat tertentu. Misal keduanya tidak menyangkal bahwa dunia internasional itu anarki. Anarki merupakan kondisi tidak adanya pemerintahan bersama sehingga tidak ada yang bisa mencegah aktor-aktor di dalamnya untuk bertindak sesuai keinginan. Perbedaannya adalah kaum neorealis mengklaim bahwa prospek bagi kerja sama dalam situasi anarki terlihat suram. Di sisi lain, neoliberalis beranggapan bahwa kerja sama dapat terbentuk dalam kondisi tertentu, yaitu kepentingan yang komplementer. Jika neorealis berpendapat institusi internasional memainkan peran kecil dalam membentuk politik

internasional, neoliberalis meyakini institusi mempengaruhi pola kerja sama yang muncul (Powell 1994).

Meskipun kaum neorealis terlihat pesimis akan prospek kerja sama, mereka tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama sebagaimana anggapan kaum neoliberalis. Keduanya sepakat bahwa negara bertindak untuk memaksimalkan keinginan pribadi, tidak lagi berdebat layaknya moralis altruis dan egois (Baldwin 1993). Neorealis dan neoliberalis memiliki pandangan rasional tentang untung dan rugi. Namun demikian, neorealis dan neoliberalis memiliki pandangan berbeda tentang perolehan yang ingin dicapai dari kerja sama. Kaum neorealis menganggap negara merasa *insecure* sehingga cenderung mempertanyakan tentang siapa yang akan mendapat untung lebih banyak (Waltz dalam Powell 1994). Negara akan mementingkan *relative gains* dalam bekerja sama. Sementara itu menurut kaum neoliberalis, negara berusaha memaksimalkan *absolute gains*. Preferensi negara berdasarkan penilaian mereka terhadap kesejahteraan mereka sendiri, bukan tergantung pada aktor lain (Keohane dalam Powell 1994).

Melihat perdebatan antara kaum neorealis dan kaum neoliberalis tentang kerja sama, pemikiran kaum neoliberalis dirasa lebih cocok untuk menjelaskan topik dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, sikap Korea Selatan menunjukkan adanya kondisi kerja sama berdasarkan *absolute gains*. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan pendekatan neoliberalis untuk menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi keputusan Korea Selatan menyepakati *Three NOs* untuk mengatasi permasalahan THAAD dengan Cina.

### **1.5.1 Interdependensi dalam Neoliberalisme**

Peningkatan interdependensi dapat menciptakan tatanan dunia baru yang sarat akan kerja sama menggantikan tatanan dunia lama yang dipenuhi konflik internasional. Hubungan interdependen akan selalu melibatkan biaya karena interdependensi melarang otonomi. Meski demikian, biaya dari suatu hubungan adalah *non zero-sum game*. Interdependensi antar militer tidak perlu berupa *zero-sum game*, begitu pula dengan kondisi *balance of power*. Selama semua pihak ingin menjaga kestabilan *status quo*, *joint gain* dapat diperoleh dengan menjaga

*balance of power* di antara mereka. Dengan kata lain, politik ekonomi dan ekologi interdependensi tetap melibatkan kompetisi sekalipun keuntungan besar dari kerja sama dapat diperkirakan (Keohane & Nye 2012, h. 8-9).

Interdependensi kompleks memiliki karakteristik tiga karakteristik antara lain adanya *multiple channels*, ketiadaan hierarki antar isu dan peran minor kekuatan militer. *Multiple channels* menghubungkan berbagai ikatan seperti ikatan formal antar elit pemerintah (interstate), informal antar elit non-pemerintah (transgovernmental) dan organisasi transnasional. Adapun agenda antar negara terdiri atas beragam isu tanpa hierarki tertentu. Ketiadaan hierarki berarti agenda militer tidak mendominasi agenda yang lain. Banyak isu terbentuk dari yang tadinya hanya kebijakan domestik, sehingga batasan antara isu domestik dan luar negeri menjadi tidak jelas. Koordinasi kebijakan yang memadai dibutuhkan karena isu yang berbeda menghasilkan koalisi dan melibatkan derajat konflik yang berbeda pula (Keohane & Nye 2012, h. 20).

Karakteristik terakhir dari interdependensi kompleks adalah peran minor kekuatan militer. Kekuatan militer tidak lagi digunakan pemerintah untuk menyerang pemerintah lain di dalam suatu daerah atau isu. Kekuatan militer tidak lagi relevan untuk menyelesaikan ketidaksetujuan dalam isu ekonomi anggota-anggota dalam suatu aliansi. Meski demikian, kekuatan militer masih penting untuk membentuk aliansi melawan blok rival (Keohane & Nye 2012, h. 21).

Tiga karakteristik utama dari interdependensi kompleks memunculkan proses politik yang mengubah sumber power menjadi power sebagai kontrol dari outcome. Dengan tidak adanya hierarki isu, tujuan menjadi terbagi berdasarkan isu dan bahkan saling tidak berhubungan satu sama lain. Adapun proses politik yang dimaksud adalah strategi linkage, agenda setting, hubungan transnasional dan transgovernmental, serta peran organisasi internasional (Keohane & Nye 2012, h. 25).

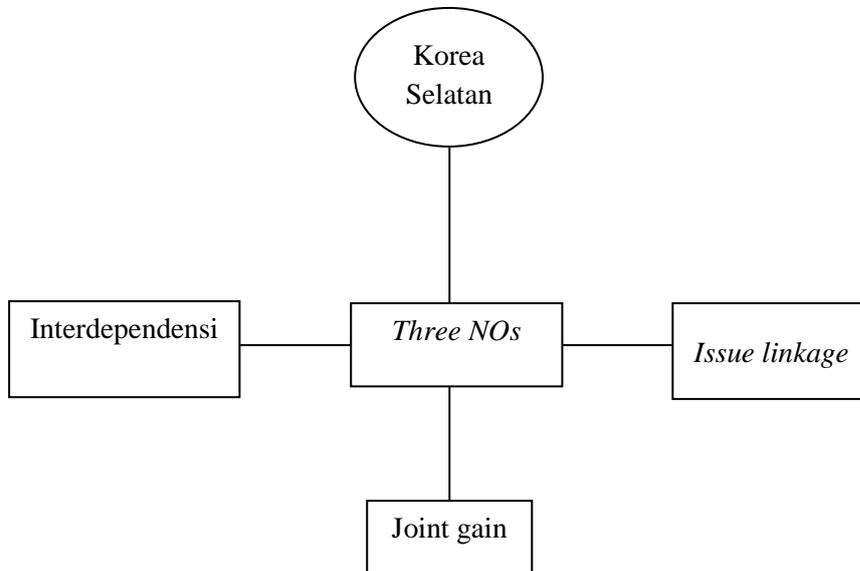
*Issue linkage* seringkali digunakan oleh negara yang *less vulnerable* sebagai sumber power. Negara akan menggunakan organisasi internasional serta aktor dan arus transnasional untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari negara lain (Keohane & Nye 2012, h. 25-28). *Issue linkage* biasa digunakan

dengan cara menggunakan satu isu untuk mempengaruhi tindakan aktor lain di isu yang lain. Dapat pula digunakan untuk masuk ke permainan lain yang semula tertutup. *Linkage* dapat berguna bagi kedua belah pihak dalam negosiasi dan dapat memfasilitasi perjanjian yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin (Axelrod & Keohane 1985, h. 239).

Mengenai *agenda setting*, cara tersebut digunakan oleh kelompok domestik yang tidak puas dengan mempolitisasi suatu isu dan mendorong suatu isu yang tadinya dianggap isu domestik menjadi agenda negara. Dalam level internasional, para aktor negara dan non negara berusaha agar isu yang mereka inginkan diangkat dalam forum internasional (Keohane & Nye 2012, h. 27-28). Hubungan transnasional dan transgovermental seringkali dimanfaatkan aktor untuk meningkatkan peluang sukses, misal agen pemerintah berusaha membawa aktor dari luar pemerintah ke dalam proses pengambilan kebijakan sebagai sekutu (Keohane & Nye 2012, h. 28). Namun demikian, politik transgovermental menyebabkan tujuan sulit didefinisikan. Aktor transnasional juga akan mengejar tujuannya tersendiri (Keohane & Nye 2012, h. 31). Kemudian organisasi internasional berperan untuk membantu pemerintah menemukan prioritasnya dengan mendefinisikan isu yang menonjol (Keohane & Nye 2012, h. 30). Organisasi akan membuat agenda, mendorong pembentukan koalisi dan menjadi arena menunjukkan diri bagi negara-negara lemah (Keohane & Nye 2012, h. 31).

Berdasarkan poin-poin yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menggunakan proses politik *issue linkage* untuk menjelaskan pertimbangan Korea Selatan menyepakati *Three NOs* untuk mengatasi permasalahan THAAD dengan Cina. Penggunaan ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Berikut skema kerangka pemikiran untuk lebih memperjelas:

## Pertimbangan Korea Selatan Menggunakan *Three NOs*



### **1.6 HIPOTESIS**

Korea Selatan menyepakati *Three NOs* agar boikot terhadap kluster industri budayanya di Cina dihentikan. Pertimbangannya karena kluster industri budaya penting bagi Korea Selatan dan negara tersebut juga memiliki interdependensi dengan Cina. Normalisasi hubungan menjadi sarana bagi Korea Selatan untuk mencapai *win-win solution*.

### **1.7 METODOLOGI**

#### **1.7.1 Definisi Konseptual**

##### **1.7.1.1 Interdependensi**

Konsep interdependensi berasal dari keberadaan dependensi. Secara umum, dependensi dapat diartikan sebagai kondisi suatu negara yang terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Berikutnya interdependensi merupakan kondisi dependensi mutual dimana hubungan yang dilakukan antar negara atau antar aktor memiliki efek resiprositas (timbang balik) (Keohane & Nye 2012, h. 7). Interdependensi tidak diartikan sebagai situasi dependensi mutual yang seimbang, namun lebih bersifat asimetris. Hal ini karena interdependensi asimetris dapat menjadi sumber pengaruh bagi para aktor untuk berurusan satu sama lain. Aktor

yang lebih tidak bergantung dapat menggunakan hubungan interdependensi sebagai sumber kekuatan dalam tawar menawar sebuah isu yang mungkin mempengaruhi isu lain (Keohane & Nye 2012, h. 9).

#### **1.7.1.2 Kerja Sama**

Konsep kerja sama disini merujuk kepada Axelrod dan Keohane (1985) yaitu tidak sama dengan harmoni. Harmoni membutuhkan kesamaan dalam mengidentifikasi kepentingan, sedangkan kerja sama justru terjadi dalam situasi yang ada percampuran antara konflik dan kepentingan yang saling melengkapi. Kerja sama terjadi ketika satu aktor dapat menyesuaikan sikapnya dengan preferensi nyata ataupun yang diperkirakan dari aktor lain. Kemudian, kerja sama juga bukan sesuatu yang selalu baik dari kaca mata moral.

#### **1.7.1.3 Boikot**

Boikot adalah alat ekonomi suatu negara untuk mendorong keinginan politiknya. Menurut Heilmann (2015), boikot perdagangan internasional merupakan bentuk spesial dari konflik antara negara-negara dengan tujuan untuk menghukum atau memaksa terkait suatu tindakan. Boikot tidak didorong oleh rasionalitas ekonomi melainkan oleh peristiwa politik yang sama sekali tidak berhubungan dengan perdagangan. Boikot dapat ditujukan kepada apapun yang berkaitan dengan negara target. Boikot menjadi pilihan ketika paksaan lain, seperti perang atau pemutusan hubungan diplomatik tampaknya tidak mungkin.

Boikot tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, namun juga oleh konsumen di negara yang berseteru dengan negara target ataupun yang memiliki isu dengan negara target. Hal ini dinamakan *consumer boycott*. Dampak boikot biasanya dapat dilihat dengan menurunnya volume perdagangan dalam jangka pendek, sekitar 1-2 tahun. Boikot lebih menyerang perusahaan negara target yang memiliki pangsa penjualan tinggi dengan negara *sender* daripada perusahaan yang sedikit beraktivitas di negara *sender* (Heilmann 2015, h. 4). Boikot berdampak lebih besar terhadap barang-barang konsumsi daripada barang non konsumsi, sebagaimana boikot terutama didorong oleh konsumen tanpa atau dengan sedikit bantuan resmi dari pemerintah (Heilmann 2015, h. 35).

## **1.7.2 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.2.1 Interdependensi**

Interdependensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi saling ketergantungan antara Korea Selatan dan Cina dalam aspek ekonomi dan politik.

### **1.7.2.2 Kerja sama**

Kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Cina dan Korea Selatan dalam menyelesaikan permasalahan akibat THAAD.

### **1.7.2.3 Boikot**

Boikot yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan yang menimpa klaster industri budaya Korea Selatan di Cina. Boikot merupakan perwujudan retaliasi akibat isu THAAD yang dilakukan oleh pemerintah dan konsumen di Cina.

## **1.7.3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Penelitian bersifat eksplanatif karena berusaha menjelaskan suatu hubungan sebab-akibat, yaitu sebab-sebab yang melatarbelakangi keputusan Korea Selatan sehingga menyepakati *Three NOs* untuk mengatasi permasalahan THAAD dengan Cina meskipun tidak menguntungkan pihaknya.

## **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Terdapat dua batasan dalam penelitian ini. Batasan ruang adalah hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Cina. Sementara itu, batasan waktunya adalah tahun 2016 hingga 2017. Tahun tersebut dipilih berdasarkan dimulai dan diakhirinya permasalahan dengan Cina yang dipicu oleh THAAD.

## **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka dengan sumber data berdasarkan buku, jurnal, situs web pemerintah, laporan dan publikasi lembaga penelitian, dan berita internasional.

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara bersamaan (Creswell, 2009: 184).

Proses yang dilalui antara lain mengorganisir data, membaca data secara keseluruhan, mengolah kembali data, menghubungkan data dan menginterpretasinya (Creswell, 2009: 185). Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan berbagai data yang mendukung dan digunakan untuk menguatkan penelitian, yaitu berupa data yang menjelaskan permasalahan THAAD yang dialami Korea Selatan dan Cina. Data yang diperoleh kemudian diorganisir, dibaca secara keseluruhan, diolah kembali, dihubungkan dan diinterpretasi.

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini, berisi pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini.

### **BAB II Permasalahan THAAD dan Implikasi *Three NOs* bagi Cina dan Korea Selatan**

Pada bab ini, penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan yang dibahas di latar belakang, berikut perolehan yang didapat masing-masing negara.

### **BAB III Analisis Keputusan Korea Selatan Menyepakati *Three NOs***

Pada bab ini, penulis akan menganalisis penyebab Korea Selatan menyepakati *Three NOs* untuk mengatasi permasalahan THAAD dengan Cina.

### **BAB IV**

Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan dari penelitian dan memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.